



Peranan Tugas Lapangan Dalam Menggalang dan Mengembangkan Kemitraan Program Keluarga Berencana (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan)

Zesty Miranda¹, M. Fikri Akbar², Asmaria³, Lusi Mariana⁴

1. Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Bandar Lampung, Indonesia-zestymirandanunung@gmail.com
2. Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Bandar Lampung, Indonesia- fikri.m.akbar@gmail.com,
3. Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Bandar Lampung, Indonesia- asmariafisip@gmail.com
4. Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Bandar Lampung, Indonesia- lusimaraiana@gmail.com

Informasi Artikel

Sejarah Artikel
Diterima Juli 2023
Disetujui Juli 2023
Dipublikasi Agustus 2023

Abstrak

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali mengakibatkan permasalahan yang sangat kompleks di Indonesia, program Keluarga Berencana menjadi salah satu jalan dalam menyeimbangkan permasalahan aspek kependudukan tersebut. Pelayanan Keluarga Berencana diberikan di berbagai unit pelayanan baik oleh pemerintah maupun swasta dari tingkat desa hingga tingkat kota dengan kompetensi yang sangat bervariasi. Pemberi layanan Keluarga Berencana antara lain adalah Rumah Sakit, Puskesmas, dokter praktek swasta, bidan praktek swasta dan bidan desa. Permasalahan sangat kompleks dan berkaitan satu sama lain sehingga mengakibatkan pertumbuhan penduduk menjadi tidak seimbang, permasalahan tersebut terurai seperti disuatu daerah dan kota-kota besar, umumnya masih sangat banyak masyarakat yang kurang memahami penting program Keluarga Berencana Nasional. Dengan adanya keterlibatan dalam perannya sebagai aparatur sipil negara Petugas Lapangan Keluarga Berencana sangat lah penting perannya mengingat salah satu keterkaitan dalam pemberdayaan masyarakat yang membantu mensosialisasikan program keluarga berencana (Keluarga Berencana). Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana dalam program Keluarga Berencana. Penelitian ini merupakan Penelitian kualitatif yang berisikan riset bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Hasil Penelitian ini akan diterbitkan pada jurnal nasional atau internasional.

Abstract

Uncontrolled population growth results in very complex problems in Indonesia, the Family Planning program is one way to balance these population issues. Family planning services are provided in various service units both by the government and the private sector from the village level to the city level with very varied competencies. Family planning service providers include hospitals, community health centers, private practice doctors, private practice midwives and village midwives. The problems are very complex and related to each other so that the population growth becomes unbalanced, these problems break down like in a region and big cities, generally there are still very many people who do not understand the importance of the National Family Planning program. With their involvement in their role as state civil servants the role of Family Planning Field Officers is very important given that one of the links in community empowerment is helping to socialize family planning programs (Family Planning). The aim of this research is to determine the role of Family Planning Field Officers in the Family Planning program. This research is qualitative research which contains descriptive research and tends to use analysis. The results of this research will be published in national or international journals.

Keywords:

Role of Family Planning Field Officers, mobilization, partnership

Alamat Koresponden:

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Bandar Lampung, Indonesia,
Email : zestymirandanunung@gmail.com

PENDAHULUAN

Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga, untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera (*Juliantoro, 2000*). Pelayanan Keluarga Berencana diberikan di berbagai unit pelayanan baik oleh pemerintah maupun swasta dari tingkat desa hingga tingkat kota dengan kompetensi yang sangat bervariasi. Pemberi layanan Keluarga Berencana antara lain adalah Rumah Sakit, Puskesmas, dokter praktek swasta, bidan praktek swasta dan bidan desa.

Petugas Lapangan Keluarga Berencana sesuai dengan peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2017 adalah Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Desa/Kelurahan dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan berupa penyuluhan, penggerakan, pelayanan, evaluasi, dan pengembangan program Keluarga Berencana serta merupakan petugas terdepan sebagai ujung tombak terdepan yang memiliki peran sangat penting sebagai pengelola, penggerak, pemberdayaan dan menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak baik individu atau institusi dari unsur pemerintah dan non pemerintah terutama pada wilayah pedesaan atau kelurahan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program Keluarga Berencana di tingkat lini lapangan. Permasalahan sangat kompleks dan berkaitan satu sama lain sehingga mengakibatkan pertumbuhan penduduk menjadi tidak seimbang, permasalahan tersebut terurai seperti disuatu daerah dan kota-kota besar, umumnya masih sangat banyak masyarakat yang kurang memahami penting program Keluarga Berencana Nasional. Jika kita telaah secara lebih mendalam permasalahan kependudukan di suatu daerah dapat diurai seperti ketika penduduknya semakin banyak karena tingkat penduduk yang semakin tinggi dan rendahnya kesadaran masyarakat akan Program Keluarga Berencana.

Tabel 1. Data Perkembangan Keluarga Berencana-Baru di Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.

No	Alat Kontrasepsi	Peserta Keluarga Berencana – Baru	
		2017	2018
1	Intrauterine Device (IUD)	207	228
2	Metoda Operasi Wanita (MOW)	47	47
3	Metoda Operasi Pria (MOP)	8	8
4	Implan	1707	1863
5	Suntik	921	1209
6	Pil	1222	1225
7	Kondom	41	47
Total Peserta KB-Baru		4153	4627

Sumber : Rekapitulasi Bulanan F11 Keluarga Berencana, Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan. Penengahan Kabupaten. Lampung Selatan

Tabel 1. diperoleh pada tahun 2017 peserta Keluarga Berencana-Baru mencapai 4153 akseptor akseptor, dan pada tahun 2018 jumlah peserta Keluarga Berencana-Baru mencapai 4627 akseptor.

Pada data diatas mengindikasikan bahwa tingkat penduduk yang semakin tinggi dan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan Program Keluarga Berencana. Hal tersebut akan mengalami sebuah kondisi dimana penduduk akan sangat padat, ketika penduduk sangat padat dan tidak dimbangi dengan aspek mobilitas yang baik misalnya seperti aspek kesehatan, aspek ekonomi dan bahkan lapangan kerja yang terbatas tentunya akan mengakibatkan kemiskinan dan bahkan lebih dari itu masyarakat akan hidup dengan kondisi yang tidak kondusif kedepannya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan maka Penelitian ini dirumuskan judul “ Peranan Petugas Lapangan dalam Menggalang Dan Mengembangkan Kemitraan Program Keluarga Berencana (studi Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan) ”.

METODE

Penelitian ini merupakan Penelitian kualitatif yang berisikan riset bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam Penelitian ini. Penelitian kualitatif merupakan Penelitian

yang tidak berupa angka melainkan berisikan hasil wawancara dan observasi. Penelitian Kualitatif mengungkapkan suatu masalah yang terjadi pada individu, kelompok, masyarakat atau organisasi berupa perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan.

Hasil Penelitian ini bersifat subjektif sehingga tidak dapat digeneralisir. Penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan observasi, melalui metode ini peneliti akan menganalisis data yang didapatkan dari lapangan dengan detail. Peneliti tidak dapat meriset kondisi sosial yang diobservasi, karena seluruh realitas yang terjadi secara ilmiah.

a. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan, dimana tempat tersebut memiliki tanggung jawab dalam bidang keluarga berencana di Kecamatan Penengahan. Penelitian yang dilakukan berupa studi kasus dengan objek penelitian di Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan yang ada di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian yang berupa studi kasus merupakan suatu metode penelitian dengan mengambil suatu objek tertentu kemudian dianalisis secara mendalam dengan cara memfokuskan suatu permasalahan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan untuk mencari alternatif penyelesaian masalah tersebut

b. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah peranan petugas lapangan dalam menggalang dan mengembangkan kemitraan program keluarga berencana dapat diterima dan dijalankan dengan baik sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.

c. Subjek dan Sumber Informasi

Subjek sebagai sasaran pada penelitian ini merupakan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan dan masyarakat sebagai pasangan usia subur dan peserta Keluarga Berencana aktif di Kabupaten Lampung Selatan. Sumber Informasi yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah utama yang diperoleh secara langsung dari Tangan pertama dilapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Data sekunder adalah sumber data yang dikutip dari sumber lain dalam bentuk dokumen literatur, brosur, dan karangan para ahli yang dianggap mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti.

Keluarga Berencana ialah suatu gerakan guna membentuk rumah tangga yang sehat dan bahagia dengan mengikuti program Keluarga

Berencana yang memiliki slogan “Dua Anak Cukup”, dengan ini peran dari Petugas Lapangan Keluarga Berencana dapat memberikan penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat dengan menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Adapun alat-alat kontrasepsi yang biasa digunakan yaitu kondom, spiral, IUD, dan lain-lain. Gerakan Keluarga Berencana di definisikan sebagai upaya meningkatkan kepedulian dan keikutsertaan masyarakat melalui usaha pendewasaan usia perkawinan dan Program Berencana.

Di Kabupaten Lampung Selatan Partisipasi masyarakat dalam program keluarga masih dikatakan sangat minim, hal tersebut tentunya menjadi salah satu sasaran Petugas Lapangan Keluarga Berencana dalam program berencana agar penduduk kecamatan dapat berkembang. Upaya-upaya atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Program Keluarga Berencana yaitu seperti melakukan sosialisasi dan penyuluhan dan mengikut sertakan masyarakat dalam posyandu dan melibatkan bidan- bidan desa yang ada, melakukan sosialisasi door to door program Keluarga Berencana untuk menekan angka kelahiran, menunda terjadinya kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi, dan sebagai kesejahteraan reproduksi. Untuk itu, di harapkan masyarakat lebih menyadari pentingnya program keluarga Berencana agar menjadi terjalinya keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Beberapa jenis kontrasepsi yang baik digunakan untuk mencegah kehamilan yang telah disediakan oleh Program Keluarga Berencana, yaitu :Intrauterine device, Kondom , Pil Keluarga Berencana, Suntik Keluarga Berencana, Metode Operasi Wanita, Metode Operasi Pria. Salah satu indikator keberhasilan program Keluarga Berencana dalam memberikan kontribusi yang dinyatakan untuk mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Setelah dilakukannya penelitian melalui wawancara dan observasi, mendalam dengan Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Balai Keluarga Berencana Kecamatan Penengahan, Perwakilan Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan, Pos Keluarga Berencana, Sub Pos Keluarga Berencana, saat ini Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah penduduk 923.002 jiwa, memiliki luas daratan + 2.109,74 km² yang terbagi dalam 17 kecamatan dan terdiri dari 248 desa dan 3 kelurahan 17 kecamatan tersebut antara lain : Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Tanjung

Sari, Katibung, Merbau, Mataram, Way Sulan, Sidomulyo, Candipuro, Way Panji, Kalianda, Rajabasa, Palas, Seragi, Penengahan, Ketapang. Berdasarkan data yang ada penduduk Kabupaten Lampung Selatan secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu penduduk asli Lampung dan penduduk pendatang. Penduduk asli khususnya sub suku Lampung Peminggir umumnya berkediaman di sepanjang pesisir pantai. Penduduk sub suku lainnya tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Penduduk pendatang yang berdomisili di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari bermacam-macam suku dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Dari semua suku pendatang tersebut jumlah terbesar adalah pendatang dari Pulau Jawa. Besarnya penduduk yang berasal dari Pulau Jawa dimungkinkan oleh adanya kolonisasi pada zaman penjajahan Belanda dan dilanjutkan dengan transmigrasi pada masa setelah kemerdekaan, disamping perpindahan penduduk secara swakarsa dan spontan. Beragamnya etnis penduduk di Kabupaten Lampung Selatan mungkin juga disebabkan karena Kabupaten Lampung Selatan sebagian besar adalah wilayah pantai sehingga banyak nelayan yang bersandar dan menetap.

Wilayah kecamatan Penengahan berada di kaki gunung Rajabasa, terletak di antara 105° 30' - 105° 40' Bujur Timur dan 5° 42' - 5° 54' Lintang Selatan. Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Palas dan Kecamatan Sragi.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bakauheni.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ketapang.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kalianda dan Kecamatan Rajabasa.

Dengan letak geografis yang demikian, seperti pada umumnya daerah di Indonesia kecamatan Penengahan merupakan wilayah tropis. Alam kecamatan Penengahan pada umumnya termasuk wilayah yang subur sehingga memungkinkan tanaman tumbuh dan selalu berbuah setiap tahunnya. Keadaan alam kecamatan Penengahan terdiri dari perbukitan dan dataran rendah dengan lahan sawah sekitar 1700 Ha dan lahan perkebunan 8200 Ha. Ketinggian rata-rata di wilayah kecamatan Penengahan ialah 127 mdpl. Semenjak dimekarkannya kecamatan Bakauheni, maka kecamatan Penengahan tidak memiliki garis pantai. Dengan gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk

kecamatan Penengahan bermata pencaharian sebagai petani.

Pada zaman pendudukan Belanda, wilayah kecamatan Penengahan merupakan daerah yang diperintah oleh Kepala Marga yang bergelar Ratu Menangsi. Ia membawahi lima marga sampai perbatasan Teluk Betung antara lain Marga Katibung, Marga Pesisir, Marga Legun (wilayah Kalianda), Marga Dantaran (beribukota di desa Penengahan) dan Marga Ratu (berpusat di Desa Benteng/Taman Baru dengan wilayah terluas meliputi seluruh kecamatan Palas sekarang). Masing-masing marga/Bandar dipimpin oleh seorang yang bergelar Pangeran.

Adapun desa yang tercatat sebagai desa tua di wilayah Marga Ratu (berusia ratusan tahun) antara lain desa Taman, Negeri Pandan, Kekiling, Kuripan, Rawi, Ruang Tengah, Kelau dan Tetaan. Untuk Wilayah Marga Dantaran sendiri antara lain desa Penengahan, Kenyayan/Banjarmasin, Tanjung Heran, Gedung harta, Gayam, Legundi, Ruguk dan desa Pegantungan/Bakauheni. Perkembangan berikutnya ialah dibukanya daerah-daerah baru seperti Pasuruan, Klaten, Sukaraja, Ketapang Karang Sari, Totoharjo, Sumur, Semanak, Palas Aji, Bangunan dan banyak desa lainnya.

Wilayah kecamatan Penengahan sendiri saat itu secara keseluruhan dapat disimpulkan agak terbelakang pembangunannya dibandingkan wilayah Kalianda. Hal ini disebabkan keadaan alamnya yang kurang mendukung sehingga agak sukar untuk dibangun jalan raya. Ditambah lagi dengan adanya sungai-sungai yang jumlahnya hamper mencapai dua puluhan dan memerlukan dibangunnya jembatan yang memenuhi syarat agar dapat dilalui kendaraan roda empat.

Pada awalnya sebagian besar penduduk kecamatan Penengahan adalah penduduk asli Lampung. Kemudian seiring digalakkannya transmigrasi oleh pemerintah, perlahan-lahan para pendatang mulai banyak yang mendiami wilayah kecamatan Penengahan. Dari segi etnis mereka pada umumnya berasal dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah & Yogyakarta. Selain itu, dalam jumlah yang relatif lebih sedikit terdapat warga dari suku Batak, Padang, Semendo, dan sebagainya. Dari total 22 desa, paling tidak 13 desa berpenduduk mayoritas Lampung. Etnis Sunda dan Banten menjadi penduduk mayoritas di enam desa yakni desa Belambangan Rawi, Padan, Way Kalam, Kampung Baru dan desa Tanjung Heran. Sedangkan pendatang dari Jawa Tengah dan Yogyakarta kebanyakan berada di desa Pasuruan, Kelaten, Gandri serta sebagian Kuripan dan Penengahan.

Keberadaan seorang Petugas Lapangan Keluarga Berencana sangat penting dalam mensukseskan program Keluarga Berencana akan tetapi terkadang sifat beberapa masyarakat yang memandang bahwa program Keluarga Berencana termasuk “haram” sering memberikan efek yang cukup besar kepada masyarakat, program Keluarga Berencana sulit untuk diterima oleh masyarakat dan pada akhirnya program Keluarga Berencana tidak berjalan dengan efektif.

B. Pembahasan

Dalam melaksanakan implementasi program keluarga berencana tentunya Petugas Lapangan Keluarga Berencana mempengaruhi keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan diantaranya :

Petugas Lapangan Keluarga Berencana mempunyai peran penting guna meningkatkan peserta Keluarga Berencana dan melakukan pendekatan terhadap masyarakat agar mau dan ikut menggunakan program Keluarga Berencana. Banyak sekali indikasi jika program Keluarga Berencana tidak terlaksana dengan baik akan menimbulkan efek yang tidak baik terhadap beberapa aspek.

Petugas Lapangan Keluarga Berencana melakukan pendekatan kepada masyarakat menggunakan beberapa cara diantaranya adalah melakukan penyuluhan rutin di posyandu, baik pada waktu seperti hari-hari besar keluarga nasional ataupun penyuluhan yang dilakukan sebulan sekali. Petugas Lapangan Keluarga Berencana pula melakukan penyuluhan kepada masyarakat tidak sendiri, dibantu dengan beberapa Pos/Sub Keluarga Berencana di setiap Kelurahan dan Bidan Desa, Petugas Lapangan Keluarga Berencana memberikan pemahaman dan masukan kepada masyarakat yang mau dan baru masuk pasangan usia subur. Dalam penyuluhan Petugas Lapangan Keluarga Berencana menjelaskan setiap alkon yang akan digunakan sebagai alat kontrasepsi, setelah dijelaskan ibu-ibu berhak memilih alkon yang akan digunakan untuk mengikuti program Keluarga Berencana.

Beberapa hal yang dilakukan dalam kegiatan penyuluhan, diantaranya pengenalan alat kontrasepsi kepada pasangan usia subur, kontrol alat kontrasepsi bagi peserta Keluarga Berencana dan beberapa kegiatan seperti konseling. Jika penyuluhan bersifat kelompok, konseling lebih bersifat komunikasi secara interpersonal. Banyak dari beberapa ibu-ibu atau pasangan usia subur sangat enggan untuk mengetahui informasi mengenai alkon pada forum-forum umum seperti penyuluhan karena mereka menilai Keluarga Berencana bersifat pribadi.

Disamping kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara kelompok seperti penyuluhan, Petugas Lapangan Keluarga Berencana pula melakukan beberapa kegiatan atau terjun langsung kelapangan, contohnya adalah kunjungan door to door yang dilakukan untuk lebih mendekatkan program kepada masyarakat. Mengapa kunjungan door to door dilakukan ? dikarenakan tidak semua masyarakat sadar akan pentingnya program Keluarga Berencana. Di Kecamatan Penengahan sendiri terkenal dengan masyarakat yang masih berpegang teguh dengan aspek adat istiadat dan keagamaan. Ini yang mengindikasikan bahwa seorang Petugas Lapangan Keluarga Berencana harus mau dan terjun kelapangan langsung guna lebih mengenal masing-masing karakter masyarakat, bagi sebagian orang di Kecamatan Penengahan program Keluarga Berencana sangat berbenturan dengan aspek keagamaan. Ini menjadi tugas yang sangat berat dijalani oleh seorang Petugas Lapangan Keluarga Berencana.

Dalam kegiatan door to door tidak jauh berbeda dengan kegiatan penyuluhan yang dilakukan di pusyandu/puskesmas hanya saja lebih bersifat pribadi karena dilakukan di rumah-rumah warga yang sudah memasuki pasangan usia subur. Dalam penyuluhan secara door to door Petugas Lapangan Keluarga Berencana umumnya didampingi oleh Pos/Sub Keluarga Berencana di setiap Kelurahan.

Keberadaan seorang Petugas Lapangan Keluarga Berencana sangat penting dalam mensukseskan program Keluarga Berencana, akan tetapi terkadang sifat beberapa masyarakat yang memandang bahwa program Keluarga Berencana termasuk “haram” sering memberikan efek yang cukup besar kepada masyarakat. Masyarakat akan takut kepada apa yang mereka pilih karena ikut program Keluarga Berencana. Ditambah permasalahan mengenai Keluarga Berencana sering diangkat oleh beberapa tokoh agama yang tidak mendukung program Keluarga Berencana.

Sebagai seorang komunikator Petugas Lapangan Keluarga Berencana harus mampu memberikan pemahaman secara baik dan akurat kepada komunitas yaitu asektor, banyak sekali aspek internal dan eksternal yang berhubungan dengan peran seorang Petugas Lapangan Keluarga Berencana. Hal tersebut sangat berkenaan sekali dalam teori atribusi yang dibahas oleh Heider, ketika seseorang melakukan sesuatu pasti terpengaruh oleh faktor dalam dirinya sendiri atau faktor lingkungannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan Perana Tugas Lapangan Dalam Menggalang dan Mengembangkan Kemitraan Program Keluarga Berencana (Studi Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan) di Kecamatan Penengahan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Petugas Lapangan Keluarga Berencana mengelola pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Berencana Nasional di desa/kelurahan, Kecamatan Penengahan, dengan cara melakukan beberapa kegiatan penyuluhan dan konseling di masyarakat didampingi oleh tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, yang berisikan mengenai program-program guna mensejahterakan kehidupan keluarga dan masyarakat peserta Keluarga Berencana.
2. Petugas Lapangan Keluarga Berencana menjadi penggerak partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana Nasional di desa/kelurahan, Kecamatan Penengahan. Ini terlihat dari pola penyampaian pesan dimana Petugas Lapangan Keluarga Berencana merupakan top management untuk memberikan informasi mengenai program-program kepada masyarakat melalui Pos Keluarga Berencana untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Tetapi peran sebagai penggerak masih kurang maksimal karena kompetensi seorang Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang kurang diantaranya penguasaan bahasa dan keahlian berkendara untuk pergi ke masing-masing pedesaan.
3. Petugas Lapangan Keluarga Berencana memberdayakan masyarakat secara baik sesuai dengan perannya. Dimana ada beberapa program yang di usung oleh program Keluarga Berencana yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat seperti pembinaan bina keluarga remaja dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Program tersebut termasuk sebagai program pemberdayaan masyarakat karena akseptor dianjurkan untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri dan mampu menunjang perekonomian keluarganya sehingga menjadi keluarga yang sejahtera.
4. Petugas Lapangan Keluarga Berencana masih kurang maksimal dalam melakukan menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana Nasional di desa/kelurahan, Kecamatan

Penengahan. Ini terlihat dari masih kurangnya komunikasi dan pendekatan dengan beberapa tokoh agama di Kecamatan Penengahan. Pendekatan dengan tokoh agama dinilai penting karena program Keluarga Berencana dinilai program yang kontra dengan aspek keagamaan bagi sebagian masyarakat di Kecamatan Penengahan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran :

1. Untuk Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Petugas Lapangan Keluarga Berencana sebagai ujung tombak di daerah, diharapkan harus mampu bekerja sesuai koridor dan proksi seorang Petugas Lapangan Keluarga Berencana dimana Petugas Lapangan Keluarga Berencana harus memiliki wawasan dan kemampuan dalam berkomunikasi yang baik dengan masyarakat. Petugas Lapangan Keluarga Berencana harus mampu menjadi seorang komunikator yang berperan mengantarkan pesan/informasi secara efektif agar masyarakat mampu memberikan efek yang baik. Petugas Lapangan Keluarga Berencana harus mampu menjalankan perannya secara maksimal agar terlaksananya program Keluarga Berencana dengan baik di Kecamatan Penengahan.
2. Untuk Pos dan Sub Keluarga Berencana sebagai salah satu mitra kerja, harus mampu bekerjasama dan kompak dengan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dalam melakukan sosialisasi program Keluarga Berencana di setiap pedesaan.
3. Untuk pihak BKKBN Provinsi dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten harus melakukan koordinasi dan melakukan evaluasi program Keluarga Berencana dengan baik. Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan oleh pihak daerah dalam menunjang program Keluarga Berencana di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Mustanir, A., & Abadi, P. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuar Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2), 247-61.
- Putra, A. H. (2016). Peran UMKM dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat

- kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(2).
- Martunus, I. (2020). Analisis Partisipasi Masyarakat Pada Program Kebersihan Lingkungan Menuju Kota Adipura Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso. *Ekomen*, 20(1), 57-68.
- Henryk, S. (2013). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan sungai keledang kecamatan samarinda seberang kota samarinda. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 612-625.
- Tindangen, G. Y. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. *Lex Administratum*, 4(2).
- Hermawan, Y., & Suryono, Y. (2016). Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program-program pusat kegiatan belajar masyarakat Ngudi Kapinteran. *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 3(1), 97-108.
- Susilawati, S., Chakim, A., Hambali, M., Islamy, M. I., & Rahmaniah, A. (2021). The urgency of digital literacy for generation z in improving learning of islamic religious education. *Library Philosophy and Practice*, 2(7), 1-15.
- Wahab, S. A. (2021). Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers,
- Sulistiyawati, Ari. 2013. *Pelayanan Keluarga Berencana*. Jakarta: Salemba Medika
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Wiknjosastro, Hanifa. 2007. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo
- Agustino, L. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik.
- Winarno, B. (2007). Kebijakan publik: Teori dan proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Baziad, A (2008). *Kontrasepsi Hormonal*. Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Handayani, Sri. 2010. *Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana*. Yogyakarta: Pustaka Rihama
- Miftah Thoha. 2012. *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mintzberg, Henry, Bruce Ahlstrand, dan Joseph Lampel. *Strategy Safari: A Guided Tour Through The Wilds of Strategic Management*. New York: The Free Press, 1998
- Manuaba, 2010. *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan KB*. Jakarta: EGC.\